

FAKTOR YANG MEMENGARUHI UPAYA PENINGKATAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM): KASUS IPM PROVINSI YANG MASIH DIBAWAH IPM NASIONAL

Adhitya Wardhana¹, Bayu Kharisma², M Zidan Fauzy³

Article history:

Submitted: 26 Februari 2023

Revised: 15 Juni 2023

Accepted:

Keywords:

Human Development Index; Indicator of Education Dimension; Generalized Least Square; Government Expenditures in the Sector of Education; Province;

Kata Kunci:

Indeks Pembangunan Manusia; Indikator Dimensi Pendidikan; Generalized Least Square; Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan; Provinsi;

Koresponding:

Departemen Ilmu Ekonomi
Universitas Padjadjaran Jawa Barat, Bandung
Email:
adhitya.wardhana@fe.unpad.ac.id

Abstract

Indonesia's Human Development Index (HDI) is a tool for assessing the quality of human resources, but some provinces still fall short in the education dimension, which is crucial for improving the HDI value. The education index is determined by variables like Mean Years of Schooling (MYS) and Expected Years of Schooling (EYS). This study aims to analyze the factors influencing the education dimension through MYS and EYS, using a descriptive analysis with a panel data model. The research sample consists of 120 observations from 24 provinces from 2017 to 2021, with provinces with an HDI value below the national HDI. The fixed effects method is used to analyze the relationship between independent and dependent variables. The provinces included in this study are those with an HDI value below the national HDI. Based on the Chow test and Hausman test results, this study uses the fixed effects method to analyze the relationship between independent and dependent variables. The findings suggest that government expenditure on education is the most significant variable affecting both MYS and EYS.

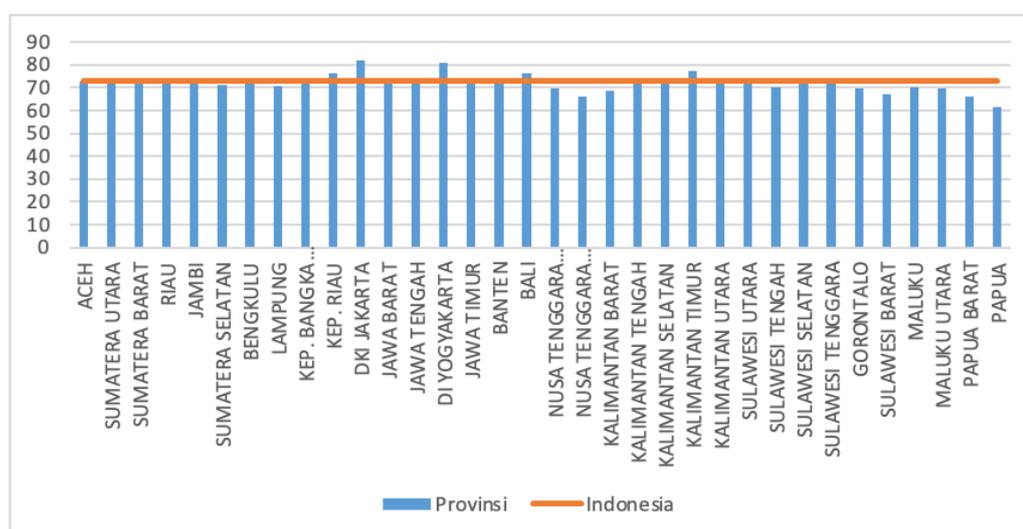
Abstrak

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah alat untuk menilai kualitas sumber daya manusia, namun beberapa provinsi masih tertinggal dalam dimensi pendidikan, yang sangat penting untuk meningkatkan nilai IPM. Indeks pendidikan ditentukan oleh variabel-variabel seperti Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dimensi pendidikan melalui RLS dan HLS, dengan menggunakan analisis deskriptif dengan model data panel. Sampel penelitian terdiri dari 120 observasi dari 24 provinsi dari tahun 2017 hingga 2021, dengan provinsi yang memiliki nilai IPM di bawah IPM nasional. Metode *fixed effect* digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Provinsi yang termasuk dalam penelitian ini adalah provinsi yang memiliki nilai IPM di bawah IPM nasional. Berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman, penelitian ini menggunakan metode *fixed effects* untuk menganalisis hubungan antara variabel independen dan dependen. Temuan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk pendidikan merupakan variabel yang paling signifikan mempengaruhi RLS dan HLS.

PENDAHULUAN

Pendidikan menjadi kebutuhan dasar pembangunan manusia untuk meningkatkan pembangunan nasional. Menurut penelitian Siti Aisyah Nurfatimah, Syofiyah Hasna & Deti Rostika (2022), melalui pendidikan dimana seseorang dapat mempelajari yang belum pernah diketahui sehingga pendidikan sebagai dasar kebutuhan manusia. Studi dari Christiane (2018), salah satu kontribusi penting pendidikan adalah dampaknya terhadap produktivitas ekonomi. Pendidikan menambah keterampilan intelektual untuk individu yang dapat meningkatkan produktivitas serta memperbaiki kondisi hidup. Masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih makmur dan lebih produktif. Keterkaitan antara pendidikan dan produktivitas bisa bersifat langsung, seperti saat siswa mempelajari keterampilan dan kompetensi khusus untuk pekerjaan atau profesi tertentu, atau lebih umum, saat mereka mengembangkan keterampilan kemanusiaan, sosial, dan intelektual yang dibutuhkan dalam lingkungan kerja masa kini. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin meningkat pembangunan nasional.

Peran pendidikan menjadi krusial, dimana masyarakat agar keluar dari jurang kemiskinan, selain itu peningkatan pendapatan perkapita suatu daerah secara tidak langsung ditentukan oleh sektor pendidikan. Setiap daerah menginginkan masyarakatnya untuk mencapai pendidikan tinggi namun masih terjadi ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia. Pendidikan tinggi akan meningkatkan dampak sosial dan ekonomi, maka pemerintah berupaya untuk mencapai sumber daya manusia yang berkualitas. Indeks pembangunan manusia (IPM) menjadi tolak ukur kualitas sumber daya manusia. . Gambar 1 menunjukkan perkembangan IPM provinsi dan nasional tahun 2022 menunjukkan beberapa daerah belum dapat menyamakan dengan nilai IPM nasional. Provinsi yang belum melebihi bahkan menyamakan nilai IPM nasional disebabkan sarana dan sumber daya untuk bidang pendidikan kurang memadai. Keterbatasan jumlah guru, ruang kelas atau gedung sekolah mengakibatkan pelaksanaan pendidikan tidak berjalan optimal. Tingkat putus sekolah yang tinggi akan menghambat rata lama sekolah dan kualitas pendidikan sehingga akan menghambat peningkatan IPM di daerah tersebut.



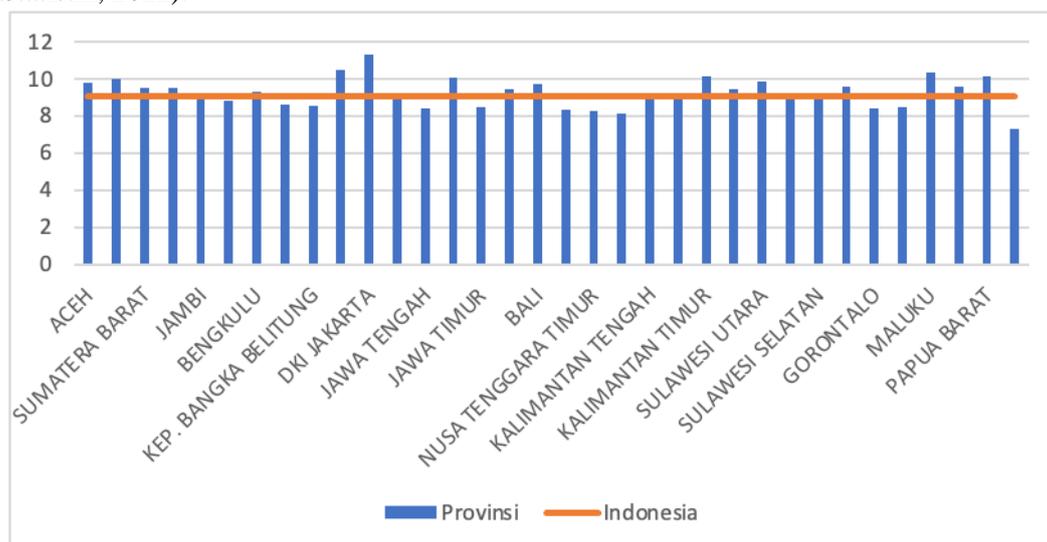
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 1.
Indeks Pembangunan Manusia Nasional Tahun 2022

Perhitungan IPM terdiri dari rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah (indikator pendidikan), angka harapan hidup saat lahir (indikator kesehatan) dan pendapatan nasional bruto perkapita (*United Nations Development Programme, 2022*). Nilai IPM ini akan menunjukkan seberapa

besar kualitas SDM suatu wilayah yang akan dicapai. Kualitas sumber daya manusia akan mencerminkan produktivitas output dikarenakan dalam faktor produksi terdapat input tenaga kerja. Tenaga kerja menjadi bagian penting untuk meningkatkan produktivitas agar output pembangunan menjadi lebih baik. Produktivitas tenaga kerja terlihat dari kualitas sumber daya manusia yang ada disuatu daerah, hal ini dapat dilihat dari perkembangan IPM. Berdasarkan United Nations Development Programme (2022), IPM Indonesia termasuk *high human development* dengan peringkat 114 pada tahun 2021. Nilai IPM Indonesia tahun 2021 sebesar 0.705 indeks dengan harapan hidup saat lahir sebesar 67.6 tahun, harapan lama sekolah sebesar 13.7 tahun, rata lama sekolah sebesar 8.6 tahun dan pendapatan nasional bruto perkapita sebesar 11.466 US Dollar (Laporan *Human Development Report* (HDR), 2022). Berdasarkan ketiga indikator IPM, terlihat nilai indikator pendidikan yang paling rendah. Beberapa program pendidikan Indonesia belum memenuhi target program pendidikan tersebut, seperti program wajib belajar 9 tahun.

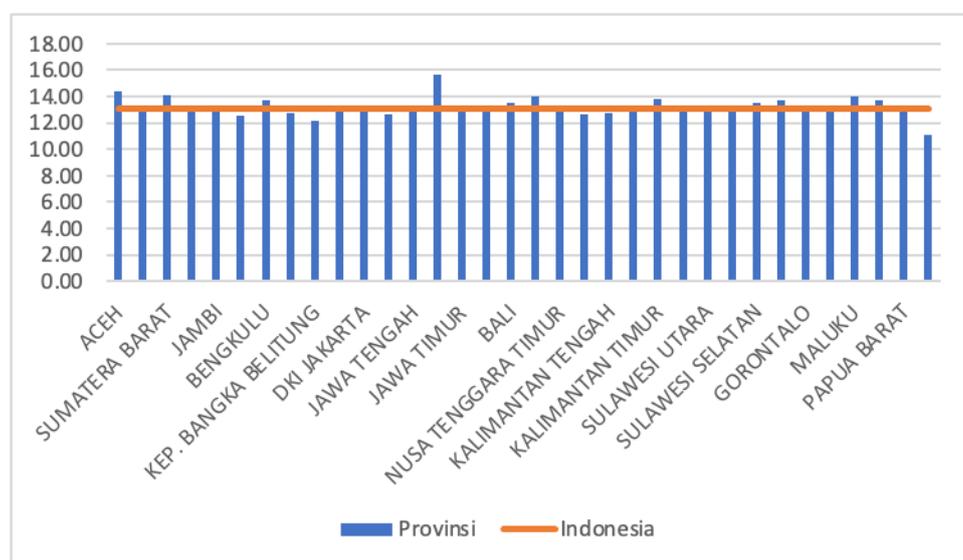
Program wajib belajar 9 tahun yang dibuat oleh pemerintah pusat ternyata masih banyak provinsi yang belum mencapai target yang dilihat dari rata-rata lama sekolah (Gambar 1). Program wajib belajar 9 tahun merupakan program pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Namun belum sepenuhnya provinsi sudah memenuhi program pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa provinsi sudah melampaui nilai IPM Indonesia dan provinsi lainnya juga belum dapat mencapai nilai IPM Indonesia tahun 2021. Pemerintah perlu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan memaksimalkan program pendidikan yang mendukung masyarakat untuk bersekolah dan menamatkan pendidikan seperti program beasiswa (BSM dan KIP). Pemerintah perlu meningkatkan kesejahteraan agar masyarakat dapat membiayai pendidikan ke jenjang pendidikan berikutnya (Lestari, 2019). Harapan lama sekolah (HLS) menjadi salah satu penentu peningkatan IPM selain RLS. HLS bagian dari perhitungan IPM dari indikator pendidikan maka sejauh ini perlu mengetahui perkembangan HLS di Indonesia. HLS adalah lamanya sekolah berdasarkan tahun yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Kondisi pembangunan dalam sistem pendidikan pada jenjang pendidikan dapat dilihat dari harapan lama sekolah (Badan Pusat Statistik, 2022).



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2022

Gambar 2.
Rata Lama Sekolah (RLS) Indonesia Tahun 2022

Berdasarkan gambar 2, secara umum provinsi di Indonesia sudah mencapai HLS Indonesia, hanya sedikit provinsi yang belum mencapai HLS Indonesia. Provinsi yang sudah mencapai HLS Indonesia menunjukkan pada anak usia 7 tahun ke atas dalam pendidikan formal memiliki peluang bersekolah di jenjang berikutnya (Badan Pusat Statistik, 2022). Kondisi HLS provinsi di Indonesia menunjukkan hasil positif, namun perlu didukung dengan peningkatan RLS dijelaskan pada Gambar 3. Peluang untuk masyarakat untuk mendapatkan pendidikan cukup besar, hal ini terlihat dari HLS provinsi yang sudah mencapai HLS Indonesia. Peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan cara menurunkan jumlah siswa putus sekolah (*drop out*). Siswa yang tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan pembangunan manusia yang rendah. Putus sekolah berakibat anak tidak memiliki kegiatan yang cenderung membantu orang dengan cara bekerja, namun pekerjaan yang didapat dengan upah yang sangat rendah. Pekerjaan yang didapat dari anak yang putus sekolah hanya berstatus magang sehingga membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan. Sosialisasi pendidikan sangat penting yang harus dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Adanya sosialisasi pendidikan diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya pendidikan (Lestari M. , 2019).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2022

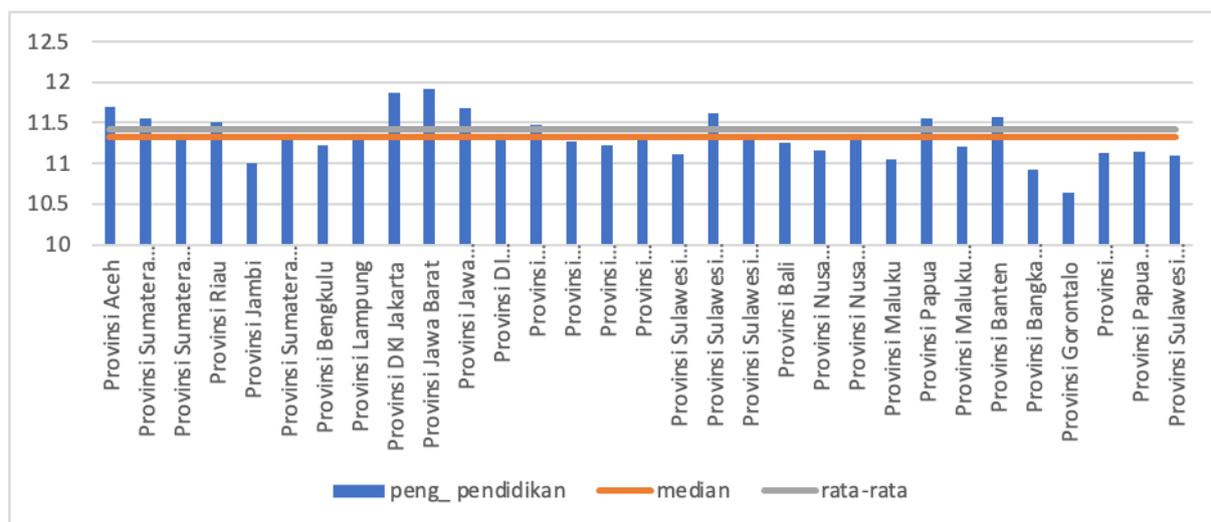
Gambar 3.
Harapan Lama Sekolah (HLS) Indonesia Tahun 2022

Beberapa penelitian yang mempengaruhi capaian pendidikan seperti penelitian Iqbal & Kiendrebeogo (2015), capaian pendidikan melalui peningkatan RLS dan HLS harus ditunjang dengan pengeluaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan siswa berupa infrastruktur sekolah. Pengeluaran pemerintah bidang pendidikan mempengaruhi positif terhadap RLS. Kemudian peningkatan RLS dapat dipengaruhi oleh PDRB perkapita, semakin besar kesejahteraan (PDRB perkapita) akan mampu membiayai pendidikan dan memenuhi target pemerintah terhadap capaian pendidikan (Rajkumar & Swaroop, 2008). Studi penelitian Melliana & Zain (2013), ketersediaan guru menjadi salah satu variabel penting dalam peningkatan RLS. Berdasarkan rasio guru murid terhadap sekolah dapat mempengaruhi positif terhadap rata lama sekolah (Iqbal & Kiendrebeogo, 2015). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu memasukkan variabel tingkat putus sekolah yang berdampak dan mempengaruhi rata lama sekolah dan harapan sekolah sebagai salah satu pembentuk kualitas sumber

daya manusia. Selama ini pengaruh kualitas pendidikan dipengaruhi output dan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan.

Peningkatan IPM diantaranya bersumber dari peningkatan RLS dan HLS, maka pemerintah perlu mengambil langkah kebijakan yang direalisasikan melalui pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Pemerintah pusat dan daerah dapat merencanakan anggaran pemerintah bidang pendidikan untuk meningkatkan indikator pendidikan seperti RLS dan HLS. Pengeluaran pemerintah dilakukan untuk meningkatkan tahap awal pembangunan dengan cara menyediakan infrastruktur seperti pendidikan (Todaro, 2011). Studi Anand & Ravallion, (1993), hasil penelitian menunjukkan pemerintah harus memperhatikan investasi pendidikan untuk penduduk usia muda. Investasi di bidang pendidikan secara tidak langsung dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Adanya infrastruktur pendidikan diharapkan dapat menurunkan berbagai hambatan penduduk yang bersekolah sehingga keterbelakang pendidikan dapat teratasi (Irawan, 2008). Pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dapat melalui program pendidikan berupa beasiswa atau subsidi pendidikan yang menjadi bagian dari investasi pendidikan (Rosen & Gayer, 2010).

Gambar 4 menunjukkan kondisi pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan setiap provinsi, menunjukkan garis horizontal terdiri dari rata-rata dan median pengeluaran pemerintah bidang pendidikan provinsi di Indonesia. Garis horizontal untuk melihat provinsi yang sudah melebihi atau dibawah rata-rata dan median pengeluaran pendidikan.



Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2022

Gambar 4.
Perkembangan Pengeluaran Pendidikan Menurut Belanja Modal Tahun 2021

Beberapa provinsi dalam pengeluaran pendidikan telah melebihi rata-rata dan median anggaran pemerintah bidang pendidikan. Median pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan di seluruh provinsi adalah 11,31%, sedangkan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk pendidikan adalah 11,32%. Mayoritas pengeluaran pendidikan provinsi masih berada dibawah rata-rata dan median pengeluaran pendidikan. Menurut beberapa penelitian yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan akan meningkatkan pencapaian pendidikan, namun provinsi di Indonesia masih banyak yang belum optimal dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan untuk kebutuhan infrastruktur pendidikan. Berdasarkan gambar 3 bahwa pengeluaran pemerintah tidak optimal karena penerimaan pemerintah daerah belum dapat memenuhi pengeluaran pendidikan. Provinsi yang belum mencapai nilai IPM Indonesia perlu mengevaluasi dari

sudut dimensi pendidikan seperti RLS dan HLS agar ke depannya dapat mencapai nilai IPM Indonesia. Provinsi yang berada di bawah nilai IPM Indonesia berdasarkan Gambar 1 yaitu Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Lampung, Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jambi

Indikator RLS dan HLS menjadi salah satu penentu pencapaian pendidikan di setiap daerah. Pemerintah daerah perlu menganalisis indikator-indikator pendidikan apa saja yang dapat meningkatkan nilai RLS dan HLS selain pengeluaran pemerintah bidang pendidikan. Indikator pendidikan yang paling mempengaruhi RLS dan HLS dapat dijadikan sebagai prioritas untuk mengangkat RLS dan HLS terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis variabel-variabel yang paling mempengaruhi terhadap Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Dengan fokus pada faktor-faktor seperti PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, serta tingkat putus sekolah pada jenjang pendidikan dasar, menengah pertama, dan menengah atas, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana masing-masing variabel tersebut berdampak pada dua indikator penting dalam dimensi pendidikan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor kunci yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan dan, pada gilirannya, kontribusi terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Data penelitian menggunakan data sekunder untuk kebutuhan analisis deskriptif kuantitatif. Objek penelitian terdiri dari rata lama sekolah, harapan lama sekolah, PDRB per kapita, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan, tingkat putus sekolah dasar/ sederajat, tingkat putus sekolah menengah pertama/ sederajat dan tingkat putus sekolah menengah atas/ sederajat (*ttps_sma*). Data untuk variabel rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, PDRB per kapita, serta tingkat putus sekolah di tingkat dasar/ sederajat, menengah pertama/ sederajat, dan menengah atas/ sederajat (*ttps_sma*) diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), sementara data mengenai pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan berasal dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Ruang lingkup penelitian terdiri dari 24 provinsi yaitu Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. Provinsi tersebut merupakan provinsi yang memiliki nilai IPM di bawah IPM nasional. Periode tahun penelitian dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dengan jumlah observasi sebesar 120.

Model panel data yang digunakan dalam penelitian ini yang disertai dengan pengujian Chow dan Hausman. Uji Chow dilakukan untuk melihat model yang paling cocok menggunakan *common effect* atau *fixed effect*. Setelah melakukan Uji Chow dilanjutkan ke pengujian Hausman apabila hasil dari Uji Chow menggunakan *fixed effect*. Pengujian Hausman untuk menentukan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling baik dalam penelitian ini. Regresi panel data memungkinkan pengendalian terhadap *fixed effect* dan *random effect* yang mungkin memengaruhi variabel dependen, meskipun kedua efek tersebut tidak diamati atau diukur secara langsung. Hal ini membantu mengurangi bias yang dapat timbul akibat variabel yang tidak terobservasi yang mempengaruhi hasil analisis. Adapun model yang digunakan dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$rls_{it} = \alpha_0 + a_1pdrb_{it} + a_2l_peng_ed_{it} + a_3ttps_sd_{it} + a_4ttps_smp_{it} + a_5ttps_sma_{it} + e_{it}(1)$$

$$hls_{it} = \alpha_0 + a_1pdrb_{it} + a_2l_peng_ed_{it} + a_3ttps_sd_{it} + a_4ttps_smp_{it} + a_5ttps_sma_{it} + e_{it}(2)$$

dimana *rls* adalah rata lama sekolah dalam tahun, harapan lama sekolah (*hls*) dalam tahun, PDRB per kapita sebagai kesejahteraan penduduk (*pdrb*) dengan satuan rupiah, pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan (*peng_ed*) dalam satuan tingkat persentase, tingkat putus sekolah dasar/ sederajat (*ttps_sd*), tingkat putus sekolah menengah pertama/ sederajat (*ttps_smp*) dan tingkat putus sekolah menengah atas/ sederajat (*ttps_sma*) dalam satuan persentase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diestimasi menggunakan regresi *Generalized Least Square* (GLS). Regresi GLS untuk mengkoreksi uji asumsi klasik yaitu autokorelasi dan heterokedastisitas (Gujarati, 2006). Tabel 1 dan 2 menjelaskan statistik deskriptif dari dua persamaan penelitian. Persamaan pertama terdapat pada tabel 1 dengan jumlah sampel 120, dimana *rls* nilai terkecil sebesar 6.27 dan nilai terbesar yaitu 10.03, untuk melihat nilai maksimum dan minimum dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nilai paling tinggi (*maximum*) dari seluruh variabel penelitian yaitu variabel *pdrb* dan nilai paling rendah (*minimum*) dari seluruh variabel penelitian yaitu variabel *ttps_sd*. Standar deviasi RLS sebesar 0.791118 yang artinya data RLS setiap tahunnya memiliki penyimpangan 0.791118 tahun.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif Persamaan (1)

Stat	Rls	Pdrb	l_peng_ed	ttps_sd	ttps_smp	ttps_sma
Mean	8,165	33245,580	12,246	6,480	16,774	41,573
Maximum	10,030	88510,410	13,104	28,170	42,810	72,560
Minimum	6,270	11863,410	11,538	0,560	6,570	25,640
Std. Dev.	0,791	14952,300	0,356	5,101	6,740	9,275
Observations	120	120	120	120	120	120

Sumber : Data Diolah, 2022

Kemudian, statistik deskriptif persamaan 2 yang menunjukkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel *hls* dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Penelitian dengan jumlah observasi sebesar 120, nilai *maximum* paling tinggi terdapat di variabel *pdrb* dan variabel *ttps_sd* menjadi variabel dengan nilai *minimum* paling rendah. Standar deviasi dari variabel *hls* menunjukkan nilai 0.68376, maka data HLS memiliki penyimpangan dalam setiap tahunnya sebesar 0.68376 tahun. Nilai statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2.
Statistik Deskriptif Persamaan (2)

Stat	Hls	pdrb	l_peng_ed	ttps_sd	ttps_smp	ttps_sma
Mean	12,970	33245,580	12,245	6,480	16,774	41,573
Maximum	14,360	88510,410	13,104	28,170	42,810	72,560
Minimum	10,540	11863,410	11,539	0,560	6,570	25,640
Std. Dev.	0,683	14952,300	0,356	5,101	6,740	9,275
Observations	120	120	120	120	120	120

Sumber : Data Diolah, 2022

Hasil penelitian berdasarkan Uji Chow menunjukkan model yang digunakan adalah *fixed effect* model berdasarkan hasil probabilitas dibawah α 5% dan hasil Uji Hausman model penelitian menggunakan model paling cocok adalah *fixed effect* model dilihat dari hasil probabilitas dibawah α 5%. Hasil pengujian *Chow Test* dan *Hausman Test* dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3.
Uji Chow dan Uji Hausman

Persamaan	rls		hls	
	Uji Chow	Uji Hausman	Uji Chow	Uji Hausman
Cross-section Chi-square	356,485	17,609	364,961	28,961
d.f	23	5	23	5
Prob.	0	0,004	0	0

Sumber : *Data Diolah, 2022*

Pada Tabel 4 menunjukkan hasil regresi dari persamaan RLS dan HLS. Hasil dari uji f-stat menunjukkan variabel bebas secara bersamaan mempengaruhi variabel RLS dan HLS yang terlihat dari prob uji f-stat sebesar 0.0000. Hasil koefisien dari variabel bebas terhadap RLS hanya variabel putus sekolah SMA yang tidak mempengaruhi secara signifikan. Nilai koefisien dari PDRB per kapita sebesar 9.44E-06 ribu rupiah, setiap kenaikan 1 ribu rupiah maka akan meningkatkan RLS sebesar 9.44E-06 tahun. Variabel PDRB per kapita dengan nilai koefisien sebesar 5.19E-06 ribu rupiah, maka kenaikan 1 ribu rupiah dari PDRB per kapita akan meningkatkan HLS sebesar 5.19E-06 tahun. Studi penelitian Dina Hernita Lestari & Andryan Setyadharma (2019) menjelaskan ketika pendapatan per kapita masyarakat meningkat, cenderung lebih mampu menyekolahkan anak-anak di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama. Kenaikan pendapatan per kapita akan berdampak pada peningkatan rata-rata lama sekolah.

Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan mempengaruhi secara signifikan dan berhubungan positif terhadap RLS dengan nilai probabilitas dibawah 10%. Nilai koefisien dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar 0.301808%, setiap kenaikan 1% dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan maka akan meningkatkan RLS sebesar 0.301808 tahun. Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap HLS menghasilkan nilai koefisien sebesar 0.165533%, kenaikan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sebesar 1% akan meningkatkan peluang untuk melanjutkan sekolah sebesar 0.165533 tahun. Menurut AO Farayibi & O Folarin (2021), menjelaskan peranan pengeluaran pemerintah menjadi peranan sentral dalam meningkatkan indikator pendidikan. Pengeluaran pemerintah untuk pendidikan untuk pemerataan di semua jenjang pendidikan guna memperbaiki indikator pengembangan modal manusia secara menyeluruh di wilayah tersebut.

Variabel pendidikan lainnya yang diprosikan dengan persentase putus sekolah berdasarkan jenjang pendidikan (SD, SMP & SMA) hanya putus sekolah jenjang SMA yang tidak signifikan terhadap rata lama sekolah, sedangkan putus sekolah jenjang SD dan SMP mempengaruhi signifikan dan negatif terhadap rata lama sekolah (RLS). Nilai koefisien dari tidak tamat SD sebesar -0.03179%, setiap peningkatan 1% dari putus sekolah SD akan menurunkan RLS sebesar 0.03179 tahun. Kemudian koefisien dari putus sekolah SMP sebesar -0.01528%, kenaikan dari putus sekolah SMP sebesar 1% maka akan menurunkan RLS sebesar 0.01528 tahun. Kemudian variabel putus sekolah jenjang pendidikan SD, SMP dan SMA mempengaruhi signifikan terhadap peluang bersekolah (HLS).

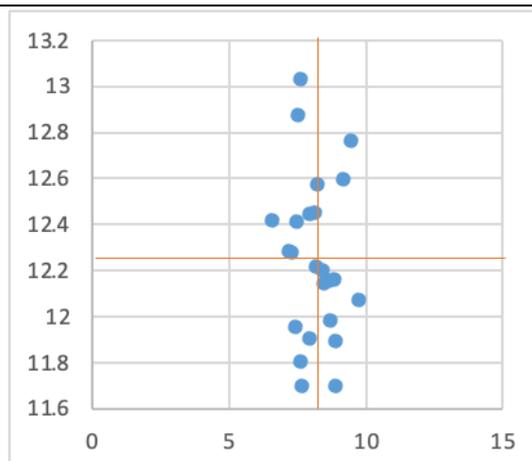
Variabel putus sekolah SD memiliki nilai koefisien sebesar -0.016484%, jadi kenaikan 1% dari putus sekolah SD akan menurunkan HLS sebesar 0.016484 tahun. Begitu juga dengan nilai koefisien dari putus sekolah SMP sebesar -0.007059%, maka kenaikan sebesar 1% dari putus sekolah SMP akan menurunkan peluang masyarakat untuk bersekolah (HLS) sebesar 0.007059 tahun. Variabel putus sekolah SMA mempengaruhi signifikan terhadap penurunan HLS, nilai dari koefisien putus sekolah SMA sebesar -0.005806%, maka setiap kenaikan 1% pada putus sekolah SMA akan menurunkan harapan sekolah sebesar 0.005806 tahun. Indikator RLS dan HLS sebagai penentu kualitas sumber daya manusia pada aspek pendidikan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Kualitas sumber daya untuk menciptakan tenaga kerja yang berkualitas serta peningkatan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah menargetkan peningkatan modal manusia salah satunya melalui RLS dan HLS. Menurut Chiara Mussida, Dario Sciulli & Marcello Signorelli (2019) bahwa dampak putus sekolah akan menghambat modal manusia, rendahnya kualitas tenaga kerja dan ketidaksetaraan pendapatan. Dengan memenuhi capaian RLS dan HLS yang ditargetkan pemerintah diharapkan semakin terampil tenaga kerja akan semakin banyak yang masuk ke pasar tenaga kerja terampil.

Tabel 4.
Hasil Regresi Panel Data (EGLS)

Variabel	Koefisien		Koefisien	
	(RLS)	Prob	(HLS)	Prob
C	4,839	0,021	11,599	0.000
PDRB(-1)	9,44	0,036	5,19	0.001
L_PENG_ED	0,302	0,081	0,166	0.003
TTPS_SD	-0,032	0,000	-0,016	0.000
TTPS_SMP	-0,015	0,010	-0,007	0.000
TTPS_SMA	-0,004	0,162	-0,006	0.000
F-STAT	466,195		2453,559	
PROB(F-STAT)	0,0000		0,000	
Adjusted R-squared	0,993		0,999	

Sumber : *Data Diolah, 2022*

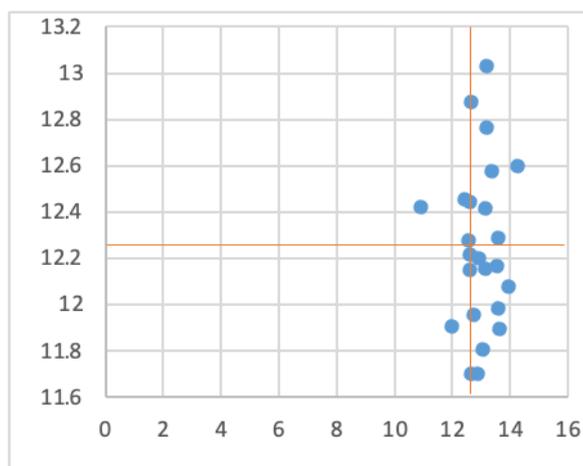
Variabel yang paling mempengaruhi dari RLS dan HLS adalah pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan. Daerah yang ingin mencapai nilai IPM Indonesia dengan cara meningkatkan RLS dan HLS melalui anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan. Menurut penelitian Iqbal et al (2016), belanja pemerintah di bidang pendidikan menjadi kunci penting dalam pembangunan manusia. Pencapaian pendidikan dapat ditingkatkan melalui RLS dan HLS agar nilai IPM di daerah tersebut menjadi lebih baik atau menyamai nilai IPM Indonesia. Anggaran pemerintah di bidang pendidikan dapat dimanfaatkan melalui peningkatan angka partisipasi sekolah, hal ini besaran angka partisipasi sekolah diharapkan dapat meningkatkan RLS dan HLS. Beberapa penelitian anggaran pemerintah di bidang pendidikan tidak mempengaruhi secara langsung terhadap RLS dan HLS, tetapi dapat melalui angka partisipasi sekolah seperti penelitian dari Baldacci et al (2008) bahwa anggaran belanja pemerintah di bidang pendidikan akan meningkatkan angka partisipasi sekolah, sehingga secara tidak langsung RLS mengalami peningkatan. Studi dari Gupta (2002) menunjukkan besaran belanja pendidikan yang tinggi untuk sekolah dasar dan menengah mempengaruhi positif terhadap capaian pendidikan seperti RLS dan HLS. Namun untuk melihat kontribusi anggaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap RLS dan HLS berdasarkan ruang lingkup penelitian dapat dilihat pada analisis kuadran di bawah ini.



Sumber: DJPK dan BPS, 2022

Gambar 4.
Kuadran Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Rata Lama Sekolah Tahun 2017 hingga 2021

Berdasarkan kuadran di atas, setiap daerah memiliki kendala ataupun keberhasilan dalam meningkatkan RLS dan HLS berdasarkan kinerja pemerintah dalam bidang pendidikan. Gambar 4, peran pengeluaran pemerintah terhadap RLS umumnya daerah penelitian berada di kuadran II dan IV. Kuadran II menunjukkan bahwa peningkatan dari pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tidak sejalan dengan peningkatan rata lama sekolah. Sedangkan kuadran IV, rendahnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan tetapi mengalami peningkatan rata lama sekolah. Hal ini dapat diindikasikan daerah yang berada di kuadran IV setidaknya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sudah memberikan hasil untuk meningkatkan RLS dibandingkan kuadran II. Kuadran di atas, menunjukkan pemerintah daerah memerlukan upaya yang cukup besar dalam memenuhi target program pendidikan seperti program wajib belajar.



Sumber: DJPK dan BPS, 2022

Gambar 5.
Kuadran Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan dan Harapan Lama Sekolah Tahun 2017-2021

Gambar 5 menunjukkan daerah penelitian cenderung berada di kuadran III yang menunjukkan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan yang rendah berdampak terhadap penurunan harapan

lama sekolah. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sangat penting untuk meningkatkan harapan lama sekolah. Hal ini terlihat dari rendahnya pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap HLS yang berada di kuadran III. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang berada di kuadran III belum berjalan secara efisien dalam meningkatkan HLS. Peningkatan kesejahteraan masyarakat yang diprosikan oleh PDRB per kapita dapat mempengaruhi capaian pendidikan, dikarenakan adanya biaya pendidikan yang tidak dipenuhi oleh anggaran pemerintah di bidang pendidikan. Ketika kesejahteraan masyarakat meningkat (PDRB per kapita), maka masyarakat mampu membiayai dan memenuhi pendidikan terutama masyarakat yang bersekolah di non-subsidi (swasta). Apabila kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan, maka kebutuhan pendidikan akan terpenuhi. Studi penelitian Khairunnisa et al (2014), Rajkumar & Swaroop (2008) dan Gupta et al. (2002) menjelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan partisipasi sekolah dan rata lama sekolah. Suatu daerah yang memiliki pendapatan per kapita yang cukup besar dibandingkan daerah lain maka masyarakat di daerah tersebut seharusnya dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Variabel putus sekolah mempengaruhi penurunan RLS dan HLS menjadi salah satu masalah yang dihadapi di dunia pendidikan. Disamping itu, putus sekolah disebabkan oleh beberapa faktor seperti rendahnya sikap dan dukungan orang tua terhadap pendidikan. Faktor lainnya dari putus sekolah yaitu tingkat pendidikan orang tua yang rendah dan miskin berdampak terhadap keuangan yang dialami oleh keluarga tersebut, sehingga banyak anak yang mengalami putus sekolah (Lestari et al, 2020) & (Dagnew, 2017). Selain itu, kurangnya program pendidikan yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan anak juga menjadi faktor utama yang menyebabkan seorang anak putus sekolah. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan menjadi salah satu fokus utama yang dapat mengurangi faktor-faktor anak putus sekolah. Pengeluaran pemerintah perlu dioptimalkan untuk mencegah terjadinya putus sekolah, sehingga akan meningkatkan nilai dari variabel RLS dan HLS. Pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membentuk sebuah program pendidikan yang dapat mendukung kebutuhan-kebutuhan anak di sekolah sehingga dapat mencegah putus sekolah dan dapat meningkatkan rata lama sekolah. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan dapat terlihat dari realisasi nyata yang berkaitan langsung dengan masyarakat, maka hal ini dapat meningkatkan harapan lama sekolah dan masyarakat memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

SIMPULAN DAN SARAN

PDRB perkapita berpengaruh positif terhadap Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Pemerintah dapat menggali potensi sektor ekonomi yang dapat meningkatkan PDRB perkapita. PDRB perkapita yang meningkat akan meningkatkan pendapatan perkapita sehingga bagi orang tua mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk pendidikan, termasuk biaya sekolah yang mendukung pendidikan anak-anak mereka lebih lama. Peningkatan PDRB per kapita memberi pemerintah kesempatan untuk memperbesar investasi dalam infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan dan renovasi sekolah, peningkatan fasilitas, serta perbaikan kualitas pengajaran. Infrastruktur yang lebih baik menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif, yang pada gilirannya dapat meningkatkan harapan lama sekolah. Variabel pengeluaran pemerintah bidang pendidikan menjadi variabel yang paling mempengaruhi terhadap peningkatan RLS dan HLS. Pemerintah dapat memprioritaskan anggaran pendidikan selain anggaran kesehatan kepentingan pendidikan seperti perbaikan infrastruktur sekolah, menyediakan fasilitas yang lebih baik, serta meningkatkan kualitas materi dan sumber daya pendidikan. Dengan fasilitas yang lebih baik dan sumber daya yang memadai, siswa cenderung dapat belajar lebih efektif, yang berkontribusi pada peningkatan rata lama sekolah.

Pemerintah dapat memberikan subsidi bagi siswa yang berisiko tidak melanjutkan pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan secara merata di setiap daerah dengan merencanakan anggaran pendidikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan di daerah masing-masing. Variabel putus sekolah memiliki mempengaruhi negatif RLS dan HLS, hal ini dapat diindikasikan perkembangan putus sekolah mengalami penurunan dalam setiap tahun. Dalam menurunkan putus sekolah dan mencapai program pendidikan yang dibuat pemerintah maka perlu memperbaiki kualitas pendidikan dengan menyertakan guru untuk mengikuti pelatihan, Pemerintah daerah perlu memperbaiki kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan minat siswa untuk membuat pendidikan lebih menarik dan bermanfaat bagi masa depan siswa. Dinas pendidikan dapat mensosialisasikan pendidikan terhadap orang tua dalam pendidikan anak mereka melalui program-program komunikasi dan kerjasama antara sekolah dan keluarga.

REFERENSI

- Anand, S., & Ravallion, M. (1993). Human Development in Poor Countries: On the Role of Private Incomes and Public Services. *Journal of Economic Perspective*, 7(1), 133-150.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Badan Pusat Statistik*. Retrieved from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/>
- Dagnew, A. (2017). Determinants of students' dropout rate in primary schools: The case of Awi zone selected schools, Ethiopia. *African Educational Research Journal*, 5(3), 186-193.
- Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan. (2023). *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, Setelah TA 2006*. Retrieved from <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=5412>
- Gujarati, D. N. (2006). *Essentials of Econometrics. 3rd Edition*. McGraw-Hill.
- Gupta, S. Verhoeven., M., & Tiongson, E R (2002). The Effectiveness of Government Spending on Education and Health Care in Developing and transition Economies. *European Journal of Political Economy*, 18, 713-717.
- Iqbal, F., & Kiendrebeogo, Y. (2015). Public Spending and Education Attainment in The Middle East and North Africa. *Review of Middle East Economics and Finance*, 11(2), 99-118.
- Irawan, & M. Suparmoko. (2008). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: BPF.
- Khairunnisa Khairunnisa, Sri Hartoyo & Lukytawati Anggraeni, L. (2014). Determinan Angka Partisipasi Sekolah SMP di Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 15(1), 91-112.
- Lestari, A. Y., Kurniawan, F., & Ardi, R. B. (2020). Penyebab Tingginya Angka Anak Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Ilmiah Sekolah Dasar*, 4(2), 299-308.
- Lestari, M. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan Ekonomi Indonesia (Studi Pada Badan Pusat Statistik Tahun 2003-2017). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 70(1), 98-105.
- Melliana, A., & Zain, I. (2013). Analisis Statistika Faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dengan Menggunakan Regresi Panel. *Jurnal Sains dan Seni Pomits*, 2(2), 237-242.
- Rajkumar, A., & Swaroop, V. (2008). Public Spending and Outcomes: does Governance Matter? *Journal of Development Economics*, 86, 96-111.
- Rosen, H. S., & Gayer, T. (2010). *Public Finance*. Boston: McGraw-Hill/Higher Education.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic Development*. PrenticeHall.
- United Nations Development Programme. (2022). *Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a Transforming World*. New York: United Nations Development Programme.